

**ANALISIS KOMPETENSI DIGITAL APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP  
PEMERINTAHAN KABUPATEN BOGOR  
(Studi Pada Aparatur Sipil Negara  
Kabupaten Bogor)**

***DIGITAL COMPETENCY ANALYSIS OF THE STATE CIVIL SERVICES IN  
BOGOR DISTRICT GOVERNMENT  
(Studies in Bogor Regency State Civil Apparatus)***

Faris Dwi Munstashir<sup>1</sup>, Dodie Tricahyono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Telkom, Bandung

farissdm@student.telkomuniversity.ac.id<sup>1</sup>, dodietricahyono@telkomuniversity.ac.id<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini berawal dari adanya fenomena transformasi digital yang terjadi secara global dan menjadi salah satu tantangan paling mendesak bagi organisasi untuk melakukan integrasi penggunaan teknologi digital didalam pengelolaan layanan yang diberikan. E-Government atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik telah menjadi pembahasan dari beberapa decade terakhir, terkhusus di Indonesia sendiri yang sudah menerapkan system e-government didalam mengelola layanan public. Untuk menjalankan SPBE tersebut, pada tingkat individu, kesiapan digital harus menjadi perhatian yang pokok, kesiapan digital sendiri dapat digambarkan sebagai keahlian digital dan kepercayaan masyarakat, tentang kapasitas individu atau pegawai pada suatu organisasi. Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran dan analisis kompetensi digital yang dimiliki oleh ASN Pemerintahan Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan adalah dengan menyebarkan survei kepada para 180 orang ASN yang tersebar pada 25 dinas di pemerintahan Kabupaten Bogor untuk mengukur persepsi mengenai kompetensi digital yang mereka miliki. Adapun dimensi dari kompetensi digital yang diukur adalah Access, Use, Communicate dan Create.

Hasil dari penelitian ini menyajikan informasi bahwa, secara keseluruhan keempat dimensi yang diukur melalui persepsi 180 ASN Kabupaten Bogor sudah masuk kedalam kategori 'Baik'. Kemudian dari jejaring laba-laba yang telah disajikan pada bab 4 penelitian ini, dapat diketahui bahwa 4 dimensi/area kompetensi digital dan nilai variable kompetensi digital secara keseluruhan dibandingkan dengan nilai kompetensi digital yang dipersyaratkan oleh expert dengan kompetensi digital yang dimiliki oleh ASN Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa keempat dimensi yang ada pada kompetensi digital ASN Kabupaten Bogor masih memiliki nilai dibawah yang disyaratkan oleh para expert, dengan dimensi akses yang memiliki nilai perbedaan paling tinggi sebesar -0.460, kemudian secara keseluruhan kompetensi digital yang dimiliki oleh ASN Kabupaten Bogor juga memiliki nilai kompetensi digital dibawah nilai yang disyaratkan oleh para expert, dengan nilai perbedaan sebesar -0.356. Sehingga ke 4 dimensi atau area kompetensi digital dan keseluruhan variable kompetensi digital tersebut harus menjadi prioritas untuk dikembangkan. Kata Kunci: E-Government, SPBE, Kompetensi Digital, IPMA.0

Kata Kunci: -E-Government, SPBE, Kompetensi Digital.

**ABSTRACT**

This research originates from the existence of a digital transformation function that occurs globally and is one of the most pressing challenges for organizations to integrate the use of digital technology in the management of services provided. E-Government or Electronic-Based Government Systems has been the subject of discussion for the last few decades, especially in Indonesia itself which has implemented an e-government system in managing public services. To run the SPBE, at the individual level, digital readiness must be a major concern, digital readiness itself can be described as digital expertise and public trust, about the capacity of individuals or employees in an organization.

In this study, the measurement and analysis of digital competencies owned by ASN Bogor Regency Government was carried out. The method used is by distributing a survey to 180 ASN people spread across 25 offices in the Bogor Regency government to measure perceptions about their digital competencies. The dimensions of digital competence that are measured are Access, Use, Communicate and Create.

The results of this study provide information that, as a whole, the four dimensions measured through the perception of 180 ASN Bogor Regency have entered the 'Good' category. Then from the spider network that has been presented in chapter 4 of this study, it can be seen that the 4 dimensions/areas of digital competence and the value of the digital competency variable as a whole are compared with the digital competency values required by experts with digital competencies owned by ASN Bogor Regency. that the four dimensions that exist in the digital competency of ASN Bogor Regency still have a value below that required by the experts, with the access dimension which has the highest difference value of -0.460, then overall the digital competence owned by ASN Bogor Regency also has a digital competency value below the value required by the experts, with a different value of -0.356. So that the 4 dimensions or areas of digital competence and all of these digital competency variables must be a priority to be developed.

Keywords: E-Government, SPBE, Digital Competence, IPMA.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

E-government dapat diartikan sebagai sistem penyalenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik atau teknologi informasi. Dalam penerapannya di Indonesia masih dalam tahap perkembangan, namun sudah menuai beberapa kendala. Misalnya, sistem informasi pelayanan publik yang belum sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat.

Menurut Fletcher dan Griffiths (2020) transformasi digital wajib dilakukan oleh semua sector. Menurut Perifanou dan Economides (2019), ada empat aspek untuk melakukan pengukuran kompetensi digital berbasis digital competence actions framework yaitu Akses (Access), Penggunaan (Use), Komunikasi (Communicate) dan Pembuatan (Create). Untuk mengetahui kompetensi digital aparatur sipil negara maka penelitian ini akan melakukan analisis kompetensi digital pada ASN Kabupaten Bogor.

Pendapat ahli diatas selaras dengan fenomena yang ada mengenai pentingnya transformasi digital didalam tubuh organisasi, kemudian pelaksanaan SPBE di Indonesia dan adanya upaya menerapkan smart city di Indonesia, penandatanganan MOU 100 Smart City di Indonesia, indeks SPBE di Indonesia, Jawa Barat kemudian Kabupaten Bogor, Tujuan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2005-2025 dan selarasnya tujuan RPJMD tersebut didalam mewujudkan tujuan SPBE di Indonesia, maka penelitian ini dianggap perlu untuk melakukan analisis kompetensi digital pada para ASN di Pemerintahan Kabupaten Bogor untuk melihat bagaimana tingkat persepsi kompetensi digital yang dimiliki oleh masing individu-individu ASN agar dapat dianalisis dan dapat memberikan gambaran tentang apa saja yang bisa ditingkatkan dalam kompetensi digital individu tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas maka penelitian ini akan mengambil judul “**Analisis Kompetensi Digital Aparatur Sipil Negara didalam Mewujudkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Studi pada Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bogor)**”.

### 1.2 Pertanyaan penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti mengangkat beberapa pertanyaan yang akan menjadi dasar serta batasan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Pertanyaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat persepsi dimensi Akses (Access) pada aparatur sipil negara Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana tingkat persepsi dimensi Penggunaan (Use) pada aparatur sipil negara Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana tingkat persepsi dimensi Komunikasi (Communicate) pada aparatur sipil negara Kabupaten Bogor?
4. Bagaimana tingkat persepsi dimensi Pembuatan (Create) pada aparatur sipil negara Kabupaten Bogor?
5. Bagaimana tingkat kinerja variable kompetensi digital secara menyeluruh yang dimiliki aparatur sipil negara Kabupaten Bogor?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat persepsi dimensi Akses (Access) pada aparatur sipil negara Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengetahui tingkat persepsi dimensi Penggunaan (Use) pada aparatur sipil negara Kabupaten Bogor.
3. Untuk mengetahui tingkat persepsi dimensi Komunikasi (Communicate) pada aparatur sipil negara Kabupaten Bogor.
4. Untuk mengetahui tingkat persepsi dimensi Pembuatan (Create) pada aparatur sipil negara Kabupaten Bogor.
5. Untuk mengetahui tingkat kinerja variable kompetensi digital secara menyeluruh yang dimiliki aparatur sipil negara Kabupaten Bogor.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Transformasi Digital

Menurut Zimmermann et al (2020: 4) Transformasi digital adalah jenis transformasi bisnis yang dominan saat ini, memiliki TI baik sebagai penggerak teknologi dan sebagai penggerak strategis. Teknologi

digital adalah pendorong utama digitalisasi karena teknologi digital mengubah cara kerja organisasi, dan berpotensi mengganggu bisnis yang ada. Zimmerman juga menyatakan bahwa, teknologi digital memberikan tiga kemampuan inti untuk merubah cara kerja organisasi, yaitu:

- a. Data yang tersedia di mana-mana.
- b. Konektivitas tak terbatas.
- c. Kekuatan pemrosesan yang masif.

Zimmermann (2020) juga mengatakan bahwa, digitalisasi menggabungkan fase matang dari transformasi digital yaitu yang semulanya dari analog melalui digital sampai pada fase digital sepenuhnya. Oleh karena itu, digitalisasi lebih membahas tentang pengalihan proses kegiatan organisasi menjadi otomatis tinggi, yang menarik dan bukan hanya komunikasi dengan menggunakan Internet.

## 2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia

Asal usul konsep Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis (SHRM) dapat ditelusuri kembali ke sistem militer - ke kata Yunani "strategos," yang berarti seorang jenderal yang mengatur, memimpin, dan mengarahkan pasukannya kedalam posisi yang paling menguntungkan (Gupta, 2020: 1). Gupta (2020: 1) menyatakan bahwa, manajemen sumber daya manusia menunjukkan bagaimana manajemen puncak memimpin organisasi ke arah tertentu untuk mencapai tujuan, sasaran, visi, dan tujuan keseluruhannya yang spesifik dalam masyarakat dan dalam lingkungan konteks tertentu. Gupta juga mengatakan bahwa, penekanan utama strategi dengan demikian memungkinkan organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan kapabilitas uniknya dengan berfokus pada arah organisasi saat ini dan masa depan.

Manajemen sumber daya manusia (HRM) adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberi kompensasi kepada karyawan, dan memperhatikan masalah hubungan kerja, kesehatan dan keselamatan, dan keadilan mereka (Dessler, 2020:3). Dari pendapat kedua ahli tersebut, maka dapat dikatakan manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan atau proses pengelolaan karyawan atau pegawai didalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi

Didalam membahas manajemen sumber daya manusia, Dessler (2020: 3) juga mengungkapkan bahwa manajer adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi, dan yang melakukannya dengan mengelola upaya orang-orang organisasi dan memiliki lima fungsi yang mewakili proses manajemen, yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Kepegawaian,Memimpin dan Mengontrol.

## 2.3 Kompetensi

Menurut Picot et al (2017: 37), Kompetensi berarti kemampuan yang dapat diulang dan tidak acak untuk menghasilkan keluaran yang kompetitif. Kemampuan ini didasarkan pada pengetahuan, disalurkan oleh aturan dan pola. Didalam buku penelitiannya Picot et al mengatakan bahwa kompetensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kompetensi individu  
Kompetensi individu adalah kemampuan seorang individu untuk melakukan tindakan dan mengambil keputusan didalam organisasi.
- b. Kompetensi organisasi  
Kompetensi organisasi adalah kompeten yang tidak bergantung pada individu dan mengacu pada tindakan kolektif orang-orang dalam suatu organisasi.

Menurut Picot et al (2017: 37), kompetensi bergantung pada proses pembelajaran dalam diri individu atau organisasi. Oleh karena itu, tingkat pengetahuan yang ada dan proses pembelajaran individu atau organisasi menentukan jenis kompetensi yang tersedia pada suatu waktu tertentu. Sedangkan menurut Hutapea dan Thoha (2008: 16) mengatakan bahwa, kompetensi adalah konsep yang lebih menekankan penerapan pengetahuan yang mengarah pada pencapaian kinerja yang luar biasa. Hutapea dan Thoha juga menyatakan, kompetensi juga mempertimbangkan interaksi manusia dengan lingkungan kerja yang akan mengefektifkan penggunaan pengetahuan dan keterampilan untuk pencapaian target kerja.

Perifanou dan Economides (2019) dalam jurnal yang diterbitkannya pada konferensi ICERI di Spanyol menyatakan, Kompetensi adalah konsep yang lebih luas yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat dikatakan kompetensi adalah kemampuan seorang individua tau organisasi yang membahas tentang pengetahuan, proses pembelajaran, keterampilan yang dimiliki oleh individu atau organisasi.

## 2.4 Kompetensi Digital

Menurut Vuorikari et al (2016), Kompetensi digital telah digunakan untuk berbagai tujuan, terutama dalam konteks ketenagakerjaan, pendidikan dan pelatihan, serta pembelajaran sepanjang hayat. Sedangkan Perifanou dan Economides (2019) mengatakan, definisi kompetensi digital sebagai

pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan berbagi sumber daya digital secara efisien, serta berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain menggunakan teknologi digital untuk mencapai tujuan tertentu. Perifanou dan Economides juga mengatakan bahwa, Sumber daya digital meliputi konten, perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan

Menurut International Telecommunications Union (ITU) atau Perserikatan Telekomunikasi Internasional dalam Perifanou dan Economides (2019), mendefinisikan kompetensi digital sebagai kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan tujuan untuk membantu individu mencapai manfaat dalam kehidupan sehari-hari untuk diri mereka sendiri dan orang lain, sekarang dan di masa depan yang semakin digital. Dengan kata lain, ITU menyatakan kompetensi digital adalah kemampuan untuk meningkatkan hasil positif dari penggunaan TIK dan mengurangi hasil negatif yang terkait dengan keterlibatan digital. Selanjutnya, ITU mengelompokkan kompetensi digital pada tiga tingkatan yaitu:

- a. Keterampilan digital dasar (untuk literasi digital individu):  
Ini adalah keterampilan yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk menjadi “melek digital”, termasuk keterampilan dalam menggunakan aplikasi digital berkomunikasi, dan menggunakan pencarian Internet dasar dengan kesadaran tentang keamanan dan / atau masalah privasi. Ini adalah keterampilan dasar untuk melakukan tugas-tugas dasar. Keterampilan dasar mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan operasi online dasar.
- b. Keterampilan digital menengah (untuk tenaga kerja umum di ekonomi digital):  
Keterampilan ini mencakup semua keterampilan digital atau TIK dasar, dan tambahan keterampilan yang dibutuhkan di tempat kerja, yang umumnya terkait dengan pengetahuan tentang penggunaan aplikasi berbeda yang telah dikembangkan oleh pengembang profesional TIK. Keterampilan menengah memungkinkan individu menggunakan teknologi digital dengan cara yang lebih bermakna dan bermanfaat, termasuk kemampuan untuk mengevaluasi teknologi secara kritis atau membuat konten.
- c. Keterampilan digital tingkat lanjut (untuk profesi TIK):  
Keterampilan ini ditargetkan pada pekerjaan yang lebih kompleks di sektor TIK, termasuk penyebaran jaringan dan layanan atau pengembangan teknologi TIK / digital baru.

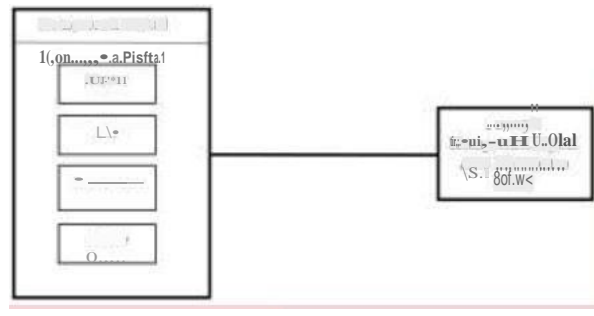
## 2.5 Konsep E-Government

Hofman et al (2020) mendefinisikan pemerintah digital, e-government adalah strategi organisasi yang berurusan dengan penerapan teknologi informasi di sektor publik. Strategi tersebut menyangkut penggunaan internal teknologi informasi yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan penyampaian layanan pemerintah yang lebih baik. Perspektif 'internal' dapat merujuk pada satu organisasi pemerintah, atau tingkat nasional, yaitu, seluruh sektor publik suatu negara. Sedangkan menurut peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 pasal 1 ayat 1, mendefinisikan e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Berdasarkan Perpres nomor 95 tahun 2018 Pasal 2 juga menjelaskan 7 (tujuh) prinsip pelaksanaan SPBE atau e-government didalam lingkup pemerintah Indonesia dan daerah, yaitu Efektivitas, Keterpaduan, Kestinambungan, Efisiensi, Akuntabilitas, Interoperabilitas dan Keamanan.

## 2.6 Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan „Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945“. Pada pasal 1 ayat 3 UU tersebut juga menyebutkan „Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom“. Pada Bab II tentang Pembagian Wilayah Negara, pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa „Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota“.

## 2.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 1 – Kerangka Pemikiran

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1 Sampel

Sampel pada penelitian ini berjumlah 180 orang ASN Kabupaten Bogor, dan pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan jenis dengan jenis *proportionate stratified random sampling*, teknik sampling ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata (Sugiyono, 2019: 130).

#### 3.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

##### 3.2.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2019: 175) hasil penelitian yang valid adalah apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Sugiyono juga mengungkapkan didalam bukunya, bahwa instrument atau alat ukur penelitian yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Hasil uji validitas instrument pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Variabel *Website Quality*

Dimensi	Item Kuisiner	r-Hitung	r-Tabel	Kesimpulan
Akses ( <i>Access</i> )	AC1	0,391	0,361	Valid
	AC2	0,380	0,361	Valid
	AC3	0,403	0,361	Valid
	AC4	0,391	0,361	Valid
	AC5	0,526	0,361	Valid
	AC6	0,517	0,361	Valid
	AC7	0,424	0,361	Valid
Menggunakan ( <i>Use</i> )	US1	0,564	0,361	Valid
	US2	0,519	0,361	Valid
	US3	0,397	0,361	Valid
	US4	0,362	0,361	Valid
	US5	0,365	0,361	Valid
	US6	0,533	0,361	Valid
	US7	0,522	0,361	Valid
	US8	0,490	0,361	Valid
	US9	0,395	0,361	Valid
	US10	0,518	0,361	Valid
	US11	0,495	0,361	Valid
	US12	0,438	0,361	Valid
	US13	0,485	0,361	Valid
	US14	0,464	0,361	Valid
	US15	0,599	0,361	Valid
	US16	0,519	0,361	Valid
Komunikasi ( <i>Communicate</i> )	CO1	0,367	0,361	Valid
	CO2	0,419	0,361	Valid
	CO3	0,563	0,361	Valid
	CO4	0,432	0,361	Valid
Membuat ( <i>Create</i> )	CR1	0,367	0,361	Valid
	CR2	0,568	0,361	Valid
	CR3	0,474	0,361	Valid
	CR4	0,524	0,361	Valid
	CR5	0,409	0,361	Valid



Dimensi	Item Kuisisioner	r-Hitung	r-Tabel	Kesimpulan
	CR6	0,455	0,361	Valid
	CR7	0,549	0,361	Valid
	CR8	0,428	0,361	Valid
	CR9	0,432	0,361	Valid
	CR10	0,480	0,361	Valid
	CR11	0,603	0,361	Valid

Seluruh item pada kuisisioner valid sehingga seluruh item dapat digunakan pada kuisisioner.

### 3.2.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2019: 175), hasil penelitian dikatakan reliabel bila terdapat kesamaan antara data dalam waktu yang berbeda. Sugiyono juga mengungkapkan didalam bukunya bahwa, instrumen yang reliabel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, hasilnya akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2019: 176).

Tabel 3.3 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
<i>Kompetensi Digital</i>	0,867	Reliabilitas Baik

## 4. Pembahasan

### 4.1 Pertanyaan Penelitian Kesatu

Berdasarkan tanggapan responden terhadap dimensi Akses yang terdiri dari 7 item kuisisioner, dapat dilihat bahwa pada item nomor 4 yaitu "Saya dapat mencari dan menemukan grup tentang topik tertentu di berbagai media sosial" mendapat tanggapan paling rendah sebesar 492 atau 68,33%. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi 180 orang ASN Kabupaten Bogor di dalam mencari dan menemukan grup tentang topik tertentu diberbagai platform media social sudah masuk kedalam kategori „baik“ tetapi masih dalam kondisi yang cukup rendah dibandingkan dengan 6 item indicator lain didalam dimensi Akses.

### 4.2 Pertanyaan Penelitian Kedua

Berdasarkan tanggapan responden terhadap dimensi Penggunaan yang terdiri dari 16 item kuisisioner, dapat dilihat bahwa pada item nomor 18 yaitu "Saya dapat mengidentifikasi hak kekayaan intelektual (HAKI) dari konten yang saya temukan di Internet" mendapat tanggapan paling rendah sebesar 466 atau 64,72%. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi 180 orang ASN Kabupaten Bogor di dalam mengenali konten-konten yang memiliki HAKI sudah masuk kedalam kategori „baik“ tetapi masih dalam kondisi yang cukup rendah dibandingkan dengan 15 item indicator lain didalam dimensi Akses.

### 4.3 Pertanyaan Penelitian Ketiga

Berdasarkan tanggapan responden terhadap Kontribusi Perguruan Tinggi yang terdiri dari 4 item kuisisioner, dapat dilihat bahwa pada item nomor 27 yaitu "Saya dapat menggunakan fitur sharing koneksi Internet, dan WiFi." mendapat tanggapan paling rendah sebesar 493 poin atau 68,47%. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi 180 orang ASN Kabupaten Bogor di dalam menggunakan atau memakai fitur sharing WiFi pada pada perangkat pintar yang dimiliki sudah masuk kedalam ketegori baik tetapi masih dalam kondisi yang cukup rendah dibandingkan dengan 3 item indicator lain didalam dimensi Komunikasi.].

### 4.4 Pertanyaan Penelitian Keempat

Berdasarkan tanggapan responden terhadap dimensi Pembuatan yang terdiri dari 11 item kuisisioner, dapat dilihat bahwa pada item nomor 38 yaitu "Saya dapat melindungi diri sendiri dan orang lain dari spam dan pesan phishing." mendapat tanggapan paling rendah sebesar 440 atau sebesar 61,11%. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi 180 orang ASN Kabupaten Bogor di dalam melindungi privasi diri sendiri dan orang lain dari serangan pesan spam dan phishing sudah termasuk dalam ketegori baik tetapi masih dalam kondisi yang cukup rendah dibandingkan dengan 10 item indicator lain didalam dimensi Pembuatan.

### 4.5 Pertanyaan Penelitian Kelima

Berdasarkan Tabel 4.10 tanggapan responden terhadap Variabel Kompetensi Digital Secara keseluruhan yang terdiri dari 38 item kuisisioner, dapat dilihat bahwa variable kompetensi digital secara keseluruhan mendapatkan skor tanggapan sebesar 19.257 atau sebesar 70,38%, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa persepsi ASN Kabupaten Bogor terhadap variable kompetensi digital pada penelitian sudah masuk kedalam kategor „baik“ tetapi masih belum maksimal, karena belum masuk kedalam kategori sangat baik.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dijabarkan dan dijelaskan dibagian atas, penelitian ini memiliki perbedaan atau persamaan dengan hasil penelitian yang ditulis oleh Rahman & Wahyuningtyas (2019) dengan judul “Analisis Dimensi Kompetensi Digital Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kota Bandung”, walaupun alat ukur yang digunakan didalam penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini, tetapi dimensi yang ada didalam penelitian tersebut memiliki kemiripan didalam definisinya. Adapun perbedaan tersebut dapat dilihat pada poin-poin dibawah ini:

1. Hasil olah data dari dimensi Akses atau kemampuan pencarian, menemukan dan mengakses dengan menggunakan teknologi digital pada ASN Kabupaten Bogor dalam penelitian ini mendapatkan hasil yang sama dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Rahman dan Wahyuningtyas (2019), dimana didalam penelitiannya menemukan bahwa dimensi Informasi dan Literasi Data juga berada pada kategori Tinggi.
2. Hasil olah data dari dimensi Menggunakan (*Use*) atau Kemampuan menyimpan, menganalisis, menggunakan, mengevaluasi, mengelola dan menghapus dengan menggunakan teknologi digital pada ASN Kabupaten Bogor dalam penelitian ini mendapatkan hasil yang sama dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Rahman dan Wahyuningtyas (2019), dimana didalam penelitiannya menemukan bahwa dimensi Pemecahan Masalah berada pada kategori Tinggi.
3. Hasil olah data dari dimensi Komunikasi (*Communicate*) atau kemampuan berinteraksi, berkolaborasi dan membagikan konten dalam menggunakan teknologi digital pada ASN Kabupaten Bogor dalam penelitian ini mendapatkan hasil yang sama dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Rahman dan Wahyuningtyas (2019), dimana didalam penelitiannya menemukan bahwa dimensi Komunikasi dan Kolaborasi berada pada kategori Tinggi.
4. Hasil olah data dari dimensi Membuat (*Create*) atau kemampuan dalam mengembangkan, menghasilkan, memodifikasi, mengintegrasikan dan melindungi dalam menggunakan teknologi digital pada ASN Kabupaten Bogor dalam penelitian ini mendapatkan hasil yang berbeda dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Rahman dan Wahyuningtyas (2019), dimana didalam penelitiannya menemukan bahwa dimensi Digital Pembuatan Konten Digital berada pada kategori Rendah.

Berdasarkan gambar 4.14 di atas, dapat dilihat bahwa perbandingan dari 4 dimensi/area kompetensi digital dan nilai variable kompetensi digital secara keseluruhan antara nilai kompetensi digital yang dipersyaratkan oleh *expert* dengan kompetensi digital yang dimiliki oleh ASN Kabupaten Bogor mendapatkan hasil yaitu, keempat dimensi yang ada pada kompetensi digital ASN Kabupaten Bogor masih dibawah nilai yang disyaratkan oleh para *expert*, dengan dimensi komunikasi yang memiliki nilai perbedaan paling tinggi sebesar 1,071, kemudia secara keseluruhan kompetensi digital yang dimiliki oleh ASN Kabupaten Bogor juga memiliki nilai kompetensi digital dibawah nilai yang disyaratkan oleh para *expert*, dengan nilai perbedaan sebesar 1,126. Sehingga ke 4 dimensi atau area kompetensi digital dan keseluruhan variable kompetensi digital tersebut harus menjadi prioritas untuk dikembangkan.

## 5. Kesimpulan dan Saran

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dengan judul “Analisis Kompetensi Digital Aparatur Sipil Negara didalam Mewujudkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Studi pada Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bogor)”, maka didapatkan beberapa kesimpulan yang diharapkan dapat memberikan jawaban atas tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Indikator didalam Variabel Akses (*Access*) secara keseluruhan masuk kedalam kategori baik dengan indikator “Saya dapat mencari dan menemukan objek tertentu atau objek serupa di berbagai media sosial menggunakan berbagai perangkat pintar”. Hal ini menandakan bahwa ASN Kabupaten Bogor telah baik didalam menggunakan fitur pencarian untuk menemukan objek tertentu di berbagai media sosial dengan menggunakan berbagai perangkat pintar. Kemudian didalam hasil analisis perbandingan, dimensi akses masih belum memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan oleh para *expert*.
2. Indikator didalam Variabel Menggunakan (*Use*) secara keseluruhan masuk kedalam kategori baik dengan indikator “Saya dapat merekam dan menyimpan konten dalam berbagai format menggunakan berbagai perangkat pintar dan alat digital”. Hal ini menandakan bahwa ASN Kabupaten Bogor telah mampu menggunakan fitur merekam dan menyimpan konten dalam berbagai format dengan menggunakan beragam perangkat pintar. Kemudian didalam hasil analisis perbandingan, dimensi menggunakan masih belum memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan oleh para *expert*.
3. Indikator didalam Variabel Komunikasi (*Communicate*) secara keseluruhan masuk kedalam kategori baik dengan indikator “Saya dapat berkomunikasi dengan orang dan/atau organisasi menggunakan berbagai alat komunikasi di perangkat pintar”. Hal ini menandakan bahwa ASN Kabupaten Bogor telah

mampu menggunakan fitur untuk berkomunikasi dengan orang atau organisasi tertentu menggunakan berbagai alat komunikasi di perangkat pintar. Kemudian didalam hasil analisis perbandingan, dimensi komunikasi masih belum memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan oleh para expert.

4. Indikator didalam Variabel Membuat (Create) secara keseluruhan masuk kedalam kategori baik dengan indikator “Saya dapat membuat ringkasan dari konten yang besar”. Hal ini menandakan bahwa ASN Kabupaten Bogor telah mampu membuat suatu ringkasan dari suatu konten yang besar yang berada di dunia maya. Kemudian didalam hasil analisis perbandingan, dimensi membuat masih belum memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan oleh para expert.
5. Secara keseluruhan variable Kompetensi Digital yang diteliti pada ASN Kabupaten Bogor mendapatkan skor tanggapan yang masuk kedalam kategori “Baik” dengan dimensi Communicate yang mendapatkan tanggapan paling tinggi dari ASN di Pemerintahan Kabupaten Bogor. Dari jejaring laba-laba yang telah disajikan pada bab 4 penelitian ini, dapat diketahui bahwa 4 dimensi/area kompetensi digital dan nilai variable kompetensi digital secara keseluruhan dibandingkan dengan nilai kompetensi digital yang dipersyaratkan oleh expert dengan kompetensi digital yang dimiliki oleh ASN Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa keempat dimensi yang ada pada kompetensi digital ASN Kabupaten Bogor masih memiliki nilai dibawah yang disyaratkan oleh para expert, dengan dimensi akses yang memiliki nilai perbedaan paling tinggi sebesar -0.460, kemudian secara keseluruhan kompetensi digital yang dimiliki oleh ASN Kabupaten Bogor juga memiliki nilai kompetensi digital dibawah nilai yang disyaratkan oleh para expert, dengan nilai perbedaan sebesar -0.356. Sehingga ke 4 dimensi atau area kompetensi digital dan keseluruhan variable kompetensi digital tersebut harus menjadi prioritas untuk dikembangkan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan para Peneliti selanjutnya. Adapun saran penelitian ini dapat dilihat pada dua poin dibawah ini.

### 5.2.1 Saran untuk Pemerintah Kabupaten Bogor

Pada bagian ini, peneliti akan memberikan saran atau masukan yang ditujukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, yaitu:

1. Indikator didalam dimensi Akses (Access) secara keseluruhan masuk kedalam kategori baik dengan indikator “Saya dapat mencari dan menemukan objek tertentu atau objek serupa di berbagai media sosial menggunakan berbagai perangkat pintar”. Hal ini menandakan bahwa ASN Kabupaten Bogor telah baik didalam menggunakan fitur pencarian untuk menemukan objek tertentu di berbagai media sosial dengan menggunakan berbagai perangkat pintar. Tetapi berdasarkan hasil uji perbandingan dengan nilai yang disyaratkan oleh para expert, dimensi akses masih mendapatkan nilai dibawah persyaratan para expert dengan perbedaan nilai sebesar -0.460, sehingga Pemerintah Kabupaten Bogor perlu melakukan suatu pelatihan atau sosialisasi mengenai cara mencari suatu informasi di media sosial atau cara menggunakan media sosial secara optimal.
2. Indikator didalam dimensi Menggunakan (Use) secara keseluruhan masuk kedalam kategori baik dengan indikator “Saya dapat merekam dan menyimpan konten dalam berbagai format menggunakan berbagai perangkat pintar dan alat digital”. Hal ini menandakan bahwa ASN Kabupaten Bogor telah mampu menggunakan fitur merekam dan menyimpan konten dalam berbagai format dengan menggunakan beragam perangkat pintar. Tetapi berdasarkan hasil uji perbandingan dengan nilai yang disyaratkan oleh para expert, dimensi menggunakan masih mendapatkan nilai dibawah persyaratan para expert dengan perbedaan nilai sebesar -0.456, sehingga Pemerintah Kabupaten Bogor perlu melakukan suatu pelatihan atau sosialisasi mengenai cara penggunaan perangkat pintar secara menyeluruh.
3. Indikator didalam dimensi Komunikasi (Communicate) secara keseluruhan masuk kedalam kategori baik dengan indikator “Saya dapat berkomunikasi dengan orang dan/atau organisasi menggunakan berbagai alat komunikasi di perangkat pintar”. Hal ini menandakan bahwa ASN Kabupaten Bogor telah mampu menggunakan fitur untuk berkomunikasi dengan orang atau organisasi tertentu menggunakan berbagai alat komunikasi di perangkat pintar. Tetapi berdasarkan hasil uji perbandingan dengan nilai yang disyaratkan oleh para expert, dimensi komunikasi masih mendapatkan nilai dibawah persyaratan para expert dengan perbedaan nilai sebesar -0.208, sehingga Pemerintah Kabupaten Bogor perlu melakukan suatu pelatihan atau sosialisasi mengenai cara melakukan komunikasi dengan menggunakan perangkat pintar yang ada sehari-hari.
4. Indikator didalam dimensi Membuat (Create) secara keseluruhan masuk kedalam kategori baik dengan indikator “Saya dapat membuat ringkasan dari konten yang besar”. Hal ini menandakan bahwa ASN Kabupaten Bogor telah mampu membuat suatu ringkasan dari suatu konten yang besar yang berada di dunia maya. Tetapi berdasarkan hasil uji perbandingan dengan nilai yang disyaratkan oleh para expert,



dimensi membuat masih mendapatkan nilai dibawah persyaratan para expert dengan perbedaan nilai sebesar -0.196, sehingga Pemerintah Kabupaten Bogor perlu melakukan suatu pelatihan atau sosialisasi mengenai cara membuat atau menulis suatu ringkasan konten dari dunia maya.

5. Secara keseluruhan variable Kompetensi Digital yang diteliti pada 180 orang ASN Kabupaten Bogor mendapatkan skor tanggapan yang masuk kedalam kategori “Baik” dengan dimensi Communicate yang mendapatkan tanggapan paling tinggi dari ASN di Pemerintahan Kabupaten Bogor. Dari jejaring laba-laba yang telah disajikan pada bab 4 penelitian ini, dapat diketahui bahwa 4 dimensi/area kompetensi digital dan nilai variable kompetensi digital secara keseluruhan dibandingkan dengan nilai kompetensi digital yang dipersyaratkan oleh expert dengan kompetensi digital yang dimiliki oleh ASN Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa keempat dimensi yang ada pada kompetensi digital ASN Kabupaten Bogor masih memiliki nilai dibawah yang disyaratkan oleh para expert, dengan dimensi akses yang memiliki nilai perbedaan paling tinggi sebesar -0.460, kemudian secara keseluruhan kompetensi digital yang dimiliki oleh ASN Kabupaten Bogor juga memiliki nilai kompetensi digital dibawah nilai yang disyaratkan oleh para expert, dengan nilai perbedaan sebesar -0.356. Sehingga kompetensi digital yang dimiliki oleh ASN Kabupaten Bogor masih harus ditingkatkan dengan cara melakukan sosialisasi, seminar atau bekerja sama dengan dunia akademisi terkhusus dari universitas yang memiliki program-program yang sudah memanfaatkan teknologi digital secara menyeluruh seperti Universitas Telkom untuk meningkatkan kompetensi digital para ASN-nya.

### 5.2.2 Saran untuk Perusahaan

Pada bagian ini, peneliti akan memberikan saran atau masukan yang ditujukan bagi penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Melihat keterbatasan objek penelitian yang hanya meneliti ASN pada pemerintahan Kabupaten Bogor, maka penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengumpulan data pada daerah yang lebih luas seperti mengambil semua kabupaten dan kota di provinsi Jawa barat.
2. Penelitian ini memiliki limitasi atau batasan pada variable yang diteliti, yaitu hanya mengukur satu variable Kompetensi Digital yang diajukan oleh Perifanou & Economides (2020), maka untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat meneliti pengaruh atau variable yang mempengaruhi kompetensi digital kedepannya, agar dapat mengetahui variable apa saja yang memiliki hubungan dengan kompetensi digital.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian mix method didalam meneliti topik yang ada pada penelitian ini agar bisa melengkapi temuan data kuantitatif yang telah disajikan pada penelitian ini.

### REFERENSI

- Dessler, G. (2020). *Human Resource Management 16th Edition*. New York: Pearson.
- Fletcher, G., & Griffiths, M. (2020). Digital transformation during a lockdown. *International Journal of Information Management*.
- Gupta, A. D. (2020). *Strategic Human Resource Management: Formulating and Implementing HR Strategies for a Competitive Advantage*. New York: Routledge.
- Hofmann, S., Madsen, C. O., & Distel, B. (2020). Electronic Government. *19th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2020* (pp. 15-28). Linkoping, Sweden: International Federation for Information Processing.
- Hutapea, P., & Thoha, N. (2008). *KOMPETENSIplus: Teori, Desain, Kasus, dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Perifanou, M., & Economides, A. (2019). An Instrument for The Digital Competence Actions Framework. *Proceedings of ICERI2019 Conference* (pp. 11139-11145). Seville, Spain: ResearchGate.
- Picot, A., Reichwald, R., Franck, E., & Moslen, K. (2017). *Organizational Competence for Servitization*. Nunberg, Germany: Springer Gabler .
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero, S., & Brande, L. V. (2016). *DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: The Conceptual Reference Model*. Luxembourg: European Union.
- Wang, H., Feng, J., Zhang, H., & Li, X. (2020). The effect of digital transformation strategy on performance The moderating role of cognitive conflict. *International Journal of Conflict Management. Vol 31. No. 3*, 441-462.

Zimmermann, A., Schmidt, R., & Jain, I. (2020). Architecting the Digital Transformation: An Introduction. In A. Zimmermann, R. Schmidt, & I. C. Jain, *Architecting the Digital Transformation: Digital Business, Technology, Decision, Support, Management* (pp. 3-8). Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG.

